



RENCANA KERJA

Perangkat Daerah

**PROVINSI
KALIMANTAN
SELATAN**

Tahun

2025

SEKRETARIAT DAERAH

**BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA**



PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi yang dilaksanakan oleh bagian-bagian kerja dalam Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan setiap tahunnya dituangkan dalam RENJA Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan.

RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan RENJA ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/ti Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Banjarbaru, Januari 2025

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,



Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si

Pembina Tingkat Utama Muda
NIP. 19740310 199003 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Capaian RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalsel.....	5
2.2 Analisa Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Kalsel	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov.Kalsel	33
3.2. Program dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP	39



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tc.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalsel	7
Tabel 2.2. Tc.30. Target dan Pencapaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Kalsel	12
Tabel 2.4 Tc.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalsel Tahun 2025	23
Tabel 2.5. Tc.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalsel	30
Tabel 3.2. Tc.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalsel Tahun 2025	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RENSTRA 2025-2029 dan pedoman yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dibawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;



- b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pembinaan sumberdaya manusia, pembinaan kelembagaan dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi Dan/Atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah



- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
 16. Peraturan Pemerintaah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517) ;
 20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi pemerintah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 090 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 089 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
Berisi uraian evaluasi Renja tahun lalu dan capaian renstra, analisa kinerja, isu-isu penting tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penetapan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan
- BAB IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran RENSTRA Tahun Keempat dalam lima tahun yaitu pada RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2025-2029. Sedangkan untuk evaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa



2.2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik

- Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

2.3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1 (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (n)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (april)(tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10		11
4.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai indeks kepuasan terhadap layanan sekretariat perangkat daerah	100	Point	100	Point	100	Point	100	Point	100	100	Point	62,78	Point	62,78%
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	25	%	25%
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dok	2	dok	6	dok	6	dok	100%	4	dok	1	dok	25%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	25	%	25%
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4	dok	12	dok	6	dok	6	dok	100%	4	dok	1	dok	36,36%
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%	0%
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atributnya kelengkapannya	4	paket	120	stell	240	stell	240	stell	100%	65	Lembar	0	Lembar	0%
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	54,23	%	54,23%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0		752	L	0		0			0		0		0%
X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	dok	12	dok	12	dok	12	dok	100%	12	dok	4	dok	46,27%
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	0		0		0			2	laporan	1	laporan	80%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	49,28	%	49,28%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55	unit	33	unit	43	unit	43	unit	100%	24	unit	6	unit	49,28%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	90	%	90%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	bln	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	4	laporan	90%
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	90	Point	90,21	Point	85	Point	93,75	Point	110%	90	Point	0	Point	0%
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30	%	0		25	%	69,98	%	280%	30	%	10	%	10%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	0		3	inovasi	4	inovasi	4	inovasi	100%	4	inovasi	0	inovasi	0%
		Indeks pelayanan publik	0		0		0		0		0%	4,01	indeks	0	indeks	0%
		Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	95	Point	99,83	Point	87	Point	99,7	Point	115%	95	Point	99,92	Point	105%
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	33,32	%	33%
		Persentase Pengad an Barang dan Jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	33,32	%	33%
		Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100	%	0		0		0		0%	100	%	33,32	%	33%
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2	laporan	2	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	2	laporan	1	laporan	50%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	4	laporan	33,33%
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	4	laporan	33,33%
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	33,32	%	33,32%
		Persentase pemenuhan pelayanan dalam memberi informasi seputar pengadaan barang dan jasa (pelayanan publik)	90	%	0		0		0		0%	90	%	30	%	33,33%
		Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	0,8	rasio	0,8	rasio	0,8	rasio	0,8	rasio	100%	0,8	rasio	0,8	rasio	100%
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	4	laporan	33,33%
	Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	4	laporan	33,33%
	pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	4	laporan	33,33%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang berkompeten	85,71	%	100	%	66,67	%	90,57	%	136%	85	%	28,24	%	33,22%
		Persentase unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) prov, kab/kota dengan tingkat kematang minimal level 3	85	%	18,18	%	30	%	54,55	%	182%	85	%	35,71	%	42,01%
		Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP)	A	Nilai	0		0		0		0%	A	Nilai	0	Nilai	0,00%
		Persentase pelayanan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	0		0		0		0%	100	%	33,33	%	33,33%
		Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	25	%	25%
		Tingkat Maturitas SPIP	3	Level	0		0		0		0%	3	Level	0	Level	0,00%
4.01.07.1.03.01	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa	40	orang	39	orang	53	orang	53	orang	100%	30	orang	8	orang	27%
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12	dok	12	dok	12	dok	12	dok	100%	12	dok	4	dok	33,33%
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	12	dok	12	dok	12	dok	12	dok	100%	12	dok	4	dok	33,33%



2.2. Analisa Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Secara umum Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai dengan hasil-hasil yang telah ditentukan. Adapun penjabaran capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti pada Tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2 (Tc.30)
PENCAPAIAN KINERJA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Indikator		SPM / Standar Nasional	IKK	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024 (n - 2)	Tahun 2025 (n - 1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n + 1)	Tahun 2024 (n - 2)	Tahun 2025 (n - 1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n + 1)	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci													
	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama			Persen	0	0	0	0	0	0,0	0	0	
	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			Persen	15	10	10	10	18,57	2,5	10	10	
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan			Persen	25	30	30	30	73,36	2,5	30	30	
	4	Peningkatan penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah			Persen	40	40	40	45	81,74	3,3	40	45	
2.	Indikator Kinerja PD													
	Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				Point	85	90	90	90	93,75	0	90	90	
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik				Inovasi	4	4	0	0	4	0	0	0	
	Indeks pelayanan publik				Point	0	4,01	0	0	0	0	0	0	
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				Point	87	95	95	96	99,70	99,92	95	96	
	Persentase proses Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu				Persen	100	100	100	100	100	33,32	100	100	
	Persentase Pengadan Barang dan Jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up				Persen	100	100	100	100	100	33,32	100	100	
	Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan				Persen	0	100	100	100	0	33,32	100	100	



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa			Laporan	12	2	2	2	12	1	2	2	
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa			Laporan	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa			Laporan	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			Persen	100	100	100	100	100	33,32	100	100	
	Persentase pemenuhan pelayanan dalam memberi informasi seputar pengadaan barang dan jasa (pelayanan publik)			Persen	0	90	90	92	0	30	90	92	
	Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan			Rasio	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik			Laporan	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa			Laporan	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa			Laporan	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Persentase SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang berkompeten			Persen	66,67	85	85,71	92,85	90,57	28,24	85,71	92,85	
	Persentase unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) prov, kab/kota dengan tingkat kematang minimal level 3			Persen	30	85	85	85	54,55	35,71	85	85	
	Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP)			Nilai	0	A	A	A	0	0	A	A	
	Persentase pelayanan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa			Persen	0	100	100	100	0	33,33	100	100	
	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa			Persen	100	100	100	100	100	25	100	100	
	Tingkat Maturitas SPIP			Level	0	3	3	3	0	0	3	3	
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa			Orang	53	30	40	40	53	8	40	40	
	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa			dokumen	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa			dokumen	12	12	12	12	12	4	12	12	



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

	Nilai indeks kepuasan terhadap layanan sekretariat perangkat daerah			Point	100	100	100	100	100	62,78	100	100	
	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik			Persen	100	100	100	100	100	25	100	100	
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			dokumen	6	4	6	6	6	1	6	6	
	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik			Persen	100	100	100	100	100	25	100	100	
	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			dokumen	6	4	4	4	6	1	4	4	
	Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Paket/Stell	240	65	4	4	240	0	4	4	
	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik			Persen	100	100	100	100	100	54,23	100	100	
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			dokumen	12	12	12	12	12	4	12	12	
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			laporan	0	2	12	12	0	1	12	12	
	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya			Persen	100	100	100	100	100	49,28	100	100	
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			unit	43	24	55	50	43	6	55	50	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik			Persen	100	100	100	100	100	90	100	100	



2.3 Isu-isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tujuan **Meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan** Sebagai perumus kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyediaan perlengkapan proses layanan pengadaan barang/jasa serta layanan pengadaan secara elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara maksimal sebagai wujud dukungan terhadap visi Kalimantan Selatan Mandiri dan Terdepan. Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan baik internal maupun eksternal organisasi.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa didalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Masih kurang/ belum memadai untuk mendukung tugas-tugas pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam Jumlah pegawai/ Aparatur Sipil Negara pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, baik sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa atau yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa serta yang mengelola perencanaan, administrasi keuangan maupun kepegawaian.
2. Keterbatasan dan Pengurangan Anggaran pada beberapa kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sehingga kurang kegiatan bimtek/pelatihan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan pembinaan terhadap kabupaten/kota belum maksimal
3. Adanya regulasi pengadaan barang dan jasa yang selalu berubah-ubah

B. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Kondisi Saat Ini

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih belum lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Masih Kurangnya SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini karena belum mencapai sesuai jumlah ABK 30 orang
2. Kurangnya SDM Tenaga Teknis dan Pengadministrasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, karena ada ASN yang Sudah Pensiun dan Meninggal Dunia;



b. Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah lancarnya proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal :

1. Tersedianya SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa agar mencapai sesuai jumlah ABK 30 orang
2. Terpenuhinya SDM Tenaga Teknis dan Pengadministrasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

c. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis Lingkungan Strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap factor-faktor lingkungan strategis

yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Prioritas factor lingkungan strategis internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

d. Analisis Lingkungan Internal.

A. Kekuatan (Strengths).

1. Struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Pengadaan barang dan Jasa bersumber dari Dana APBD.
3. Sarana dan prasarana unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan pada tahun 2025 ini sudah tercatat dan diinventarisir dengan baik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa , sedangkan sarananya antara lain peralatan kantor mendukung program kerja dan kegiatan kerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Kelemahan (Weaknesses).

Jumlah pegawai/ Aparatur Sipil Negara pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, baik sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa atau



yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa serta yang mengelola perencanaan, administrasi keuangan maupun kepegawaian masih kurang/ belum memadai dalam mendukung tugas-tugas pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

c. Analisis Lingkungan Eksternal.

A. Peluang (Opportunities).

- 1) Diklat dan Bimtek bagi pegawai/aparatur, dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai/aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika/ informasi yang sangat mendukung mobilitas pelaksanaan pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, seperti perkembangan komputerisasi, internet dan media sosial yang akan membuat pekerjaan lebih mudah diolah dan dikerjakan; dan
- 3) Peraturan pelaksanaan yang dibuat/ diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, dengan adanya peraturan yang akan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah terutama tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Tantangan/Ancaman (Threats).

- 1) Adanya tuntutan untuk mengikuti Diklat Teknis Aparatur.
- 2) Adanya tuntutan untuk meningkatkan kemampuan diri untuk menambah wawasan dan meningkatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
- 3) Membina Hubungan kerja dengan SKPD terkait dengan meningkatkan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Pusat.

iv. Asumsi Strategis.

Asumsi strategis penentuan prioritas perencanaan terhadap factor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis *Strenghts*, *Weaknesses*, *Opportunities and Threats* (SWOT Analysis), sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut :

A. Asumsi Strategis Strenghts-Opportunities (SO).

1. Optimalkan kualitas Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pencapaian kinerja dapat lebih maksimal, lebih efektif dan lebih efisien.



2. Optimalkan ketersediaan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa/ jabatan fungsional tertentu dalam mendukung tugas – tugas pengelolaan barang dan jasa.

B. Asumsi Strategis *Strenghts-Threats* (ST).

1. Manfaatkan kebijakan dan upaya pimpinan dalam mengkoordinasikan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih professional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Manfaatkan kebijakan dan upaya pimpinan dalam mengkoordinasikan kepada SKPD terkait dalam peningkatan ketersediaan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dengan mengangkat jabatan fungsional tertentu dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan barang dan jasa.

C. Asumsi Strategis *Weaknesses-Opportunities* (WO).

1. Tingkatkan pemahaman atas upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil agar lebih profesional.
2. Tingkatkan profesionalitas aparatur untuk dipromosikan dalam jabatan fungsional tertentu dengan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

D. Asumsi Strategis *Weaknesses -Threats* (WT).

1. Tingkatkan pemahaman atas upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil untuk mengantisipasi adanya aparatur yang masih kurang terampil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tingkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan melalui pembinaan aparatur untuk dipromosikan dalam jabatan fungsional tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kurangnya tenaga pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

v. Prioritas Asumsi Strategis.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



- a. Optimalkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
- b. Optimalkan tenaga analis jabatan, dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.
- c. Manfaatkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

D. Faktor Kunci Keberhasilan.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan yang kuat dari pimpinan dan semua pegawai/SDM (ASN/Non ASN) dalam merespon kepentingan daerah
2. Sarana dan prasarana berupa ruang kerja, peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3. Adanya kebutuhan dan kepercayaan stakeholder terhadap pera Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam usaha mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang professional, akuntabel dan berkualitas



➤ IDENTIFIKASI MASALAH/AKAR MASALAH PADA BIRO PENGADAAN BARANG & JASA

URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Pemerintah Bidang Penunjang Pemerintah		
Sekretariat Daerah		
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Adanya regulasi pengadaan barang dan jasa yang selalu berubah-ubah	Peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diterbitkan oleh instansi pusat yang berpengaruh pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di daerah
	2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika/informasi	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat menuntut SDM untuk dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya
	3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Sarana kantor LPSE dan ruang layanan tamu yang belum representative dalam mendukung pelayanan public/pengguna layanan pengadaan barang dan jasa yang berkonsultasi
		Meubelair berupa meja dan kursi untuk pelayanan kepada tamu masih kurang
		Peralatan computer PC, Laptop dan printer sebagai penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan masih kurang
	4. Terbatasnya sumber daya manusia	Keterbatasan jumlah SDM yang akan mempengaruhi keterbatasan pelayanan
		Jumlah fungsional PBJ yang memenuhi ABK yang telah ditetapkan dan adanya fungsional PBJ yang pensiun



		Jumlah fungsional umum/pelaksana yang juga masih kurang karena ada sub bagian yang tidak memiliki ASN dan adanya ASN/Pelaksana yang pensiun
	5. Pembinaan Kalsel terhadap UKPBJ Kab/Kota	Pembinaan UKPBJ di Kab/Kota se-Kalsel belum maksimal yang mengakibatkan tingkat kematangan UKPBJ pada 9 Kab/Kota belum mencapai Level 3/Pro aktif
		Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota se-Kalsel



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana halnya dengan RENJA Tahun 2025 ini, RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Dengan kata lain RKPD Tahun 2025 adalah RKPD Tahap V berjalan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Visi yang hendak dicapai dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dengan Visi : ***“Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera”***.

Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan TUPOKSI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. RENSTRA adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pengelolaan administrasi aset pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Tujuan Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tercemin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti tersebut diatas, maka disusunlah program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Adapun hasil telaahan dengan Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel 2.3 beriku :



Tabel 2.4 (Tc 31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Predikat indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa 2. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 3. Indeks pelayanan publik 4. Indeks kepuasan masyarakat 5. Jumlah inovasi pelayanan publik PBJ yang diterapkan	90 Point 30% 4.01 95 Point 4	Rp.3.148.750.750	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru	1. Predikat indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa 2. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 3. Indeks pelayanan publik 4. Indeks kepuasan masyarakat 5. Jumlah inovasi pelayanan publik PBJ yang diterapkan	90 Point 30% 4.01 95 Point 4	Rp.3.330.206.250
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up 3. Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100% 100% 100%	Rp.568.845.750	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up 3. Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100% 100% 100%	Rp.625.229.750



	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 laporan	Rp.267.902.750	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 Laporan	Rp.281.736.750
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	Rp.176.297.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	Rp.197.572.000
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	Rp.124.646.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	Rp.145.921.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan. 2. Persentase pemenuhan pelayanan publik 3. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan.	100% 90% (4:5 = 0,8)	Rp.1.276.411.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan. 2. Persentase pemenuhan pelayanan publik 3. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan.	100% 90% (4:5=0,8)	Rp.1.311.520.000
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik		Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan	Rp.626.378.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik		Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan	Rp.647.653.000
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.290.583.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.304.417.000



	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.359.450.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.359.450.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase UKPBJ Prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan min. Lev 3 2. Persentase SDM PBJ yang berkompeten 3. Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP) 4. Persentase pelayanan administrasi Biro PBJ 5. Persentase terpenuhinya layanan permasalahan PBJ 6. Tingkat maturitas SPIP	85% 85% A 100% 100% Lev 3	Rp.1.303.494.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase UKPBJ Prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan min. Lev 3 2. Persentase SDM PBJ yang berkompeten 3. Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP) 4. Persentase pelayanan administrasi Biro PBJ 5. Persentase terpenuhinya layanan permasalahan PBJ 6. Tingkat maturitas SPIP	85% 85% A 100% 100% Lev 3	Rp.1.393.456.500
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan,	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	30 orang	Rp.431.518.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	33 orang	Rp.469.893.500



	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sungai Besar	Jumlah laporaan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.290.174.000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.319.175.500
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.581.802.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.604.387.500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan		Rp.1.177.146.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, B anjarbaru Selatan, Sungai Besar	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan		Rp.1.479.171.900
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	Rp.6.145.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	Rp.6.145.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	Rp.6.145.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	Rp.6.145.000



	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	100%	Rp.7.400.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	100%	Rp.7.400.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang sesuai ketentuan	4 Dokumen	Rp.7.400.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang sesuai ketentuan	4 Dokumen	Rp.7.400.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Rp.19.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Rp.19.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	65 Lembar	Rp.19.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	65 Lembar	Rp.19.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	Rp.442.101.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	Rp.492.126.900



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp.104.324.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp.104.324.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dok	Rp.337.777.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dok	Rp.387.802.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp. 336.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp.588.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit/buah	Rp.336.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36 unit/buah	Rp.588.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik	100%	Rp.366.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik	100%	Rp.366.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	Rp.366.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	Rp.366.000.000	
TOTAL					Rp.4.325.897.650	TOTAL					Rp.4.809.378.150



Tabel 2.5 (Tc 32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya/ Volume	Catatan
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1. PREDIKAT INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2. RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN 3. JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK 4. INDEKS PELAYANAN PUBLIK 5. NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	90 Point 30% 4 4.01 95 Point	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up 3. Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100% 100% 100%	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 Laporan	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu 2. Persentase pemenuhan pelayanan publik 3. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% 90% Rasio 0,8	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	



	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase UKPBJ Provinsi, Kab/Kota dengan tingkat kematangan level 3 2. Persentase SDM PBJ yang berkompeten 3. Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP) 4. Persentase pelayanan administrasi Biro pengadaan Barang dan Jasa 5. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa 6. Tingkat maturitas SPIP	85% 85% A 100% 100% Lev 3	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM PBJ	33 org	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai indeks kepuasan terhadap layanan sekretariat daerah perangkat daerah	100 Point	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	100%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 Lembar	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dok	



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	36 unit/buah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah **Meningkatkan efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan**, yang tercemin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. Predikat indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa
2. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2025 ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan melaksanakan 2 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan perkiraan Total Pagu Anggaran sebesar Rp.4.809.378.150,-. Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Sebagai Tabel Berikut **(Tc 33)** :



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)		Prakiraan Rencana 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif(Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif(Rp.)
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1. PREDIKAT INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2. RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN 3. JUMLAH INOVASI YANG DITERAPKAN 4. INDEKS PELAYANAN PUBLIK 5. NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	90 Point 30% 4 4.01 95 Point	Rp.3.330.206.250	90 Point 30% 4 4.01 95 Point	Rp.6.273.864.900
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up 3. Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100% 100% 100%	Rp.625.229.750	100% 100% 100%	Rp.1.292.361.000
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 Laporan	Rp.281.736.750,-	2 laporan	Rp.525.263.000
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.197.572.000,-	12 laporan	Rp.431.675.000



	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.145.921.000,-	12 laporan	Rp.335.423.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu 2. Persentase pemenuhan pelayanan publik 3. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% 90% Rasio 0,8	Rp.1.311.520.000,-	100% 90% Rasio 0,8	Rp.2.446.944.400
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan	Rp.647.653.000,-	12 Laporan	Rp.1.016.648.900
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah pengembangan fitur/konten sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.304.417.000,-	12 Laporan	Rp.636.670.750
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarmaru Selatan,Sungai Besar	1. Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	Rp.359.450.000,-	12 Laporan	Rp.793.624.750



	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Persentase UKPBJ Prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan lev. 3 2. Persentase SDM PBJ yang berkompeten 3. Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP) 4. Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro 5. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa 6. Tingkat maturitas SPIP	85% 85% A 100% 100% Lev 3	Rp.1.393.456.500,-	85% 85% A 100% 100% Lev 3	Rp.2.534.559.500
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	33 orang	Rp.469.893.500,-	49 orang	Rp.795.236.500
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.319.175.500,-	12 dok	Rp.625.969.500
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 dok	Rp.604.387.500,-	12 dok	Rp.1.113.353.500,-



2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Keseekretariat	100 Point	Rp.1.479.171.900,-	100 Point	Rp.2.230.410.900
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	Rp.6.145.000,-	100%	Rp.9.690.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarb aru Selatan,Sungai Besar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	Rp.6.145.000,-	6 Dokumen	Rp.9.690.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	100%	Rp.7.400.000,-	100%	Rp.22.194.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarb aru Selatan,Sungai Besar	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 Dokumen	Rp.7.400.000,-	4 Dokumen	Rp.22.194.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Rp.19.500.000,-	100%	Rp. 135.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarb aru Selatan,Sungai Besar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	65 Lembar	Rp.19.500.000,-	290 paket	Rp. 135.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	Rp.492.126.900,-	100%	Rp.1.028.026.900
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp.104.324.000,-	2 Laporan	Rp. 310.306.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan Kota	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dok	Rp.387.802.900,-	12 Dok	Rp. 717.720.900



		Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp.336.000.000,-	100%	Rp.669.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36 unit/buah	Rp.336.000.000,-	55 unit/buah	Rp.669.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik	100%	Rp.366.000.000,-	100%	Rp.366.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru,Banjarbaru Selatan,Sungai Besar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp.366.000.000,-	12 laporan	Rp.366.000.000
	Total				Rp.4.809.378.150		Rp.8.504.275.800



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan merupakan manifestasi dari respon Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai/SDM yang ada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan. Aamiin.